

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**JUMAIDI, SPd.,MPd.  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19670817 200003 1 006**

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	dst
BAB I DATA INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP	

---

## **BAB I**

### **DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **A. Program dan Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran 2022, BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp. 16.137.919.531,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.143,756.530,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 494.824.100,- untuk melaksanakan 2 program, 12 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 8 kegiatan dan 46 sub kegiatan yaitu:
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
      - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
      - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
      - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
      - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
-

- 3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
    - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
    - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
    - 4) Monitoring, Evaluasi. Dan Penilaian Kinerja Pegawai;
    - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Mebel;
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin;
    - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
-

- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
  - 4) Pemeliharaan Mebel;
  - 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 7) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- II. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 4 kegiatan dan 16 sub kegiatan yaitu:
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
    - 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
  2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
    - 2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
    - 3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
    - 4) Pengelolaan Risiko Bencana;
    - 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
    - 6) Penanganan Pascabencana Provinsi;
    - 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
    - 8) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
    - 9) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - 1) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
    - 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
    - 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
    - 4) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit;
  4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    - 1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
-

- 2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi.

## **B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.798.037.994,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.481.016.654,- atau sebesar 95.93% dan realisasi fisik sebesar 100,00%, terdiri dari 8 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan rincian realisasi per kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Keluaran : Persentase Sinkronisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 85%
    - Hasil : Meningkatnya Perencanaan Dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 100%
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Keluaran : Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPBD yang disusun 2 dokumen
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 14.434.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.373.800,- atau sebesar 99.58% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    - Keluaran : Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPBD yang disusun 2 dokumen
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 7.010.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.949.400,- atau sebesar 99.12% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
    - Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun 2 dokumen
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 10.310.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.253.700,- atau sebesar 99.45% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
    - Keluaran : Jumlah Dokumen DPA yang disusun 1 dokumen

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 8.248.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.223.800,- atau sebesar 99.71% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
- Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun 2 dokumen
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 7.423.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.362.200,- atau sebesar 99.18% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun 4 dokumen
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 68.709.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.194.113,- atau sebesar 91.97% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Keluaran : Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan yang disusun 13 dokumen
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 7.096.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.035.800,- atau sebesar 99.14% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Keluaran : Tertib Administrasi Keuangan 12 bulan
  - Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi keuangan sebesar 100%
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Keluaran : Gaji dan tunjangan ASN BPBD untuk satu tahun sudah dianggarkan 50 orang
  - Realisasi: Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.694.076.907,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.543.730.385,- atau sebesar 96.80% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Keluaran : Jumlah ASN yang mendapatkan honor 18 orang
-



- Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 217.566,700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 204.367.900,- atau sebesar 93.93% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Keluaran : Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan 100 Dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.231.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.231.200,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang disusun 36 Dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.560.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.063.050,- atau sebesar 98.37% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun 1 Dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 59.826.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.894.675,- atau sebesar 98.44% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Keluaran : Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan 2 Dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.892.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.892.900,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Keluaran : Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan 13 Dokumen
-

- Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.380.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.583.053,- atau sebesar 98.16% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Keluaran : Jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun 1 dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.735.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.735.500,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Keluaran : Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 12 bulan
  - Hasil : Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah 100%
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Keluaran : Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun 1 dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.211.300,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
- Keluaran : Jumlah Dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.211.300,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Keluaran : Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penertiban 1 Dokumen
-

- Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.211.300,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Keluaran : Dokumen barang milik daerah semesteran dan akhir tahun yang disusun 3 Dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.878.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.878.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Keluaran : Jumlah dokumen laporan barang milik daerah 1 dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 91.235.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.786.242,- atau sebesar 97.32% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- Keluaran : Jumlah dokumen usulan pinjam pakai 1 dokumen dan jumlah dokumen usulan sewa 1 dokumen
  - Realisasi : Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.056.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.056.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Keluaran : Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60%
  - Hasil : Meningkatnya Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Keluaran : Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 90 Stel
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 67.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.100.000,- atau sebesar 92.00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
-

- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola 45 Dokumen
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 2.528.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.528.000,- atau sebesar 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
    - Keluaran : Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 12 kali
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 63.945.142,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.874.452,- atau sebesar 95.20% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - Keluaran : Jumlah Aparatur yang dinilai kinerjanya 45 orang
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp.2.316.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.316.800,- atau sebesar 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat 3 orang
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 21.6661.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.617.200,- atau sebesar 95.18% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Keluaran : Tertib Administrasi Umum 12 bulan
  - Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi Umum 100%
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
    - Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 116 unit
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 22.002.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.002.200,- atau sebesar 100.% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
-

- Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 349 Unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 67.267.580,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.111.500,- atau sebesar 92.33% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 1083 unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 41.533.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.434.500,- atau sebesar 92.54% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Keluaran : Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang disediakan 51479 lembar
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 13.071.106,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.000.000,- atau sebesar 99.46% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 7 set
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 14.760.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.580.000,- atau sebesar 98.78% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 1 dokumen
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 305.687.396,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 305.326.851,- atau sebesar 99.88% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Keluaran: Tertib Administrasi Umum 12 bulan
  - Hasil: Meningkatnya Tertib Administrasi Umum 100%
-

1) Pengadaan Mebel;

- Keluaran : Jumlah Mebel 7 unit/set
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 6.638.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.638.600,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Baru
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 24.150.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.150.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Keluaran : Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1 unit
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Keluaran : Tertib Administrasi Umum 12 bulan
- Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi Umum 100%

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Keluaran : jumlah surat – surat masuk dan surat – surat keluar dalam 1 tahun 500 surat
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 5.234.550,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.930.000,- atau sebesar 94.18% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Keluaran : Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 100 mbps, jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2 rekening, jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan 12 bulan, jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 1375 KVA
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 299.822.259,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.127.293,- atau sebesar 65.08% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
-

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Keluaran : Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia 26 orang
- Realisasi: alokasi anggaran sebesar Rp. 891.782.804,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 874.990.940,- atau sebesar 98.12% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Keluaran : Tertib Administrasi Umum 12 bulan
- Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi Umum 100%

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Keluaran : kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 1 unit
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.190.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 51 Unit
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 389.452.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 387.315.450,- atau sebesar 99.45% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- Keluaran : Jumlah Alat Besar yang dipelihara 1 unit
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 24.998.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.976.250,- atau sebesar 99.91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

4) Pemeliharaan Mebel

- Keluaran : Jumlah Mebel yang dipelihara 1 unit
-

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 99.91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 99 unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 10.190.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.190.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab 1 unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 145.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 144.941.000,- atau sebesar 99.62% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab 5 unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.480.000,- atau sebesar 99.91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab 2 unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.950.000,- atau sebesar 99.00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

II. Program Penanggulangan Bencana alokasi anggaran sebesar Rp. 8.339.881.537,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.813.761.987,- atau sebesar 93.69% dan realisasi fisik sebesar 100,00%, terdiri dari 4

---



kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan rincian realisasi per kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

- Keluaran : Persentase Penyebarluasan Data Dan Informasi Bencana Yang Dilaksanakan 56%
- Hasil : Meningkatnya Penyebarluasan Data Dan Informasi Bencana 100%

1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).

- Keluaran : Kampanye/publikasi media/pameran/ pembuatan baliho kebencanaan yang dilaksanakan 1 kali ; Sosialisasi dan Penyuluh kebencanaan di masyarakat yang dilaksanakan 2 kali; Sosialisasi dan penyuluh kebencanaan di sekolah/kampus yang dilaksanakan 58 kali
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 639.782.487,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 586.411.377,- atau sebesar 91.66% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Keluaran : Persentase Kelembagaan Dan Masyarakat Yang Siap Menghadapi Bencana 56%
- Hasil : Meningkatnya Kesiapan Kelembagaan dan Masyarakat Menghadapi Bencana 100%

1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;

- Keluaran : Pelatihan kebencanaan bagi aparatur yang dilaksanakan 90 orang ; Pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan 630 orang
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 1.891.592.653,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.779.099.724,- atau sebesar 94.05% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana;

- Keluaran : Petugas PUSDALOPS PB yang difasilitasi 12 bulan
-

- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 1.319.445.171,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.275.155.600,- atau sebesar 96.64% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- Keluaran : Sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (peralatan perlindungan, EWS tsunami/letusan gunung api/banjir/longsor) yang disediakan 33 unit
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 554.255.432,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 468.742.611,- atau sebesar 84.57% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 4) Pengelolaan Risiko Bencana;
- Keluaran : Mengikuti jamboree PRB tingkat nasional 1 kali; Rapat koordinasi PRB tingkat Provinsi yang dilaksanakan 1 kali
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 319.073.956,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.140.002,- atau sebesar 93.75% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- Keluaran : Pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB)
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 1.708.459.316,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.590.763.138,- atau sebesar 93.11% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
- 6) Penanganan Pascabencana Provinsi;
- Keluaran : Bimbingan teknis/workshop JITU PASNA yang dilaksanakan 25 orang; Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang Dikoordinasikan 1 Laporan; Rapat Koordinasi/Pertemuan Teknis JITU PASNA yang dilaksanakan 28 orang
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 296.434.271,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 284.869.573,- atau sebesar 96.10% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
-

- 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
    - Keluaran : Pembinaan/Pelatihan TRC Provinsi/Kabupaten /Kota yang dilaksanakan 35 orang
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 121.811.378,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 115.276.611,- atau sebesar 94.64% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 8) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
    - Keluaran : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Dilaksanakan 1 kali
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 177.690.778,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.750.840,- atau sebesar 93.28% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 9) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
    - Keluaran : Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang disusun 1 Dokumen
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 324.089.611,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 290.315.817,- atau sebesar 89.58% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Keluaran : Persentase Penanganan Tanggap Darurat Yang Dilaksanakan 76%
  - Hasil : Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat 100%
- 1) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
    - Keluaran : Penanganan Darurat Bencana secara terpadu yang dikoordinasikan 1 laporan
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 307.650.516,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 301.367.569,- atau sebesar 97.96% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
  - 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
    - Keluaran : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana yang dikoordinasikan 1 laporan
    - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 47.608.088,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.663.750,- atau sebesar 98.02% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
-

3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Keluaran : Logistik/Peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan 2 paket
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 420.978.544,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 411.415.995,- atau sebesar 97.73% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

4) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit

- Keluaran : Penanganan Epidemii/wabah penyakit secara terpadu yang dikoordinasikan 1 laporan
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 48.963.324,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.756.513,- atau sebesar 99.58% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Keluaran : Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 56%
- Hasil : Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan 100%

1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;

- Keluaran : Laporan hasil pengukuran/penyebarluasan basis data kebencanaan yang dilaksanakan 2 laporan
- Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 28.973.328,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.610.198,- atau sebesar 84.94% dan realisasi fisik sebesar 100,00%

2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi.

- Keluaran : Laporan hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan 1 laporan
  - Realisasi : alokasi anggaran sebesar Rp. 133.072.684,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 125.422.669,- atau sebesar 94.25% dan realisasi fisik sebesar 100,00%
-

### C. Outcome

Outcome Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan, meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait, meningkatkan kapasitas aparat penanggulangan bencana, meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan operasional Pusdalops PB.
  2. Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana dengan meningkatkan jumlah *early warning system* dan meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan *stock opname*
  3. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana dengan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana.
  4. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana dengan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana.
  5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan organisasi.
-

## BAB II

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### 2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.137.919.531,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.294.778.641,- atau 91.83%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja**  
**Pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	77	63.10	81.94
		2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (%)	86	43	50
II	Program Penanggulan an Bencana	1. Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabup aten/kota)	20	20	100
		2. Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5		

		3. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%)	100	100	100
		4. Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan (%)	100	100	100

1.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Permendagri No 86 tahun 2017, Pergub No. 45 Tahun 2019				7.798.037.994	7.481.016.654	95.93
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					123.232.600	117.392.813	95.26
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	2 dokumen	100	14.434.000	14.373.800	99.58
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		9 dokumen;	9 dokumen;	100	7.010.800	6.949.400	99.12
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		9 dokumen	9 dokumen	100	10.310.000	10.253.700	99.45

4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	8.248.000	8.223.800	99.71
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	7.423.200	7.362.200	99.18
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		4 dokumen	4 dokumen	100	68.709.800	63.194.113	91.97
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokumen	4 dokumen	100	7.096.800	7.035.800	99.14
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>5.068.270.507</b>	<b>4.902.498.663</b>	<b>96.73</b>
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang	42 orang	100	4.694.076.907	4.543.730.385	96.80
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		20 Orang	20 Orang	100	217.566.700	204.367.900	93.93
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3 Dokumen	3 Dokumen	100	8.231.200	8.231.200	100.00
4)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100	30.560.450	30.063.050	98.37
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100	59.826.450	58.894.675	98.44
6)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.892.900	7.892.900	100.00
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		13 Dokumen	13 Dokumen	100	43.380.400	42.583.053	98.16



	Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							
8)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100	6.735.500	6.735.500	100.00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>109.803.150</b>	<b>107.345.142</b>	<b>97.77</b>
1)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	3.211.300	3.211.300	100.00
2)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	3.211.300	3.211.300	100.00
3)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	3.211.300	3.211.300	100.00
4)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 dokumen	3 dokumen	100	5.878.000	5.878.000	100.00
5)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	91.235.250	88.786.242	97.32
6)	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	3.056.000	3.056.000	100.00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>157.951.442</b>	<b>148.436.452</b>	<b>93.98</b>
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		90 stel	90 stel	100	67.500.000	62.100.000	92.00
2)	Pendataan dan		45	45	100	2.528.000	2.528.000	100.00

	Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen	dokumen				
3)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 kali	12 kali	100	63.945.142	60.874.452	95.20
4)	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		45 orang	45 orang	100	2.316.800	2.316.800	100.00
5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 orang	3 orang	100	21.661.500	20.617.200	95.18
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Permendagri No 86 tahun 2017, Pergub No. 45 Tahun 2019</b>				<b>464.321.482</b>	<b>455.455.051</b>	<b>98.09</b>
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		116 unit/buah	116 unit/buah	100	22.002.200	22.002.200	100
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		349 unit/buah	349 unit/buah	100	67.267.580	62.111.500	92.33
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.083 unit/buah	1.083 unit/buah	100	41.533.200	38.343.500	99.46
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		51.479 lembar	51.479 lembar	100	13.071.106	13.000.000	99.46
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		7 set	7 set	100	14.760.000	14.580.000	98.78
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 dokumen	1 dokumen	100	305.687.396	305.326.851	99.88
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik</b>					<b>35.788.600</b>	<b>35.788.600</b>	<b>100.00</b>

	<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
1)	Pengadaan Mebel		18 unit/set	18 unit/set	100	6.638.600	6.638.600	100.00
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit/set	3 unit/set	100	24.150.000	24.150.000	100.00
3)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	2 unit	100	5.000.000	5.000.000	100.00
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.196.839.613</b>	<b>1.075.048.233</b>	<b>89.82</b>
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 surat	500 surat	100	5.234.550	4.930.000	94.18
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.375 KVA; 100 mbps; 2 rekening;	1.375 KVA; 100 mbps; 2 rekening;	100	299.822.259	195.127.293	65.08
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		26 orang	26 orang	100	891.782.804	874.990.940	98.12
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>641.830.600</b>	<b>639.042.700</b>	<b>99.57</b>
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	1 unit	100	39.190.000	39.190.000	100.00
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		51 unit	51 unit	100	389.452.500	387.315.450	99.45

	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		1 unit	1 unit	100	24.998.100	24.976.250	99.91
4)	Pemeliharaan Mebel		1 unit	1 unit	100	5.000.000	5.000.000	100.00
5)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		99 unit	99 unit	100	10.190.000	10.190.000	100.00
6)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		1 unit	1 unit	100	145.500.000	144.941.000	99.62
7)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 unit	5 unit	100	22.500.000	22.480.000	99.91
8)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	2 unit	100	5.000.000	4.950.000	99.00
<b>II</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>					<b>8.339.881.537</b>	<b>7.813.761.987</b>	<b>93.69</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>					<b>639.782.487</b>	<b>586.411.377</b>	<b>91.66</b>
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan		140 kali; 4 kali; 5 kali;	140 kali; 4 kali; 5 kali;	100	639.782.487	586.411.377	91.66

	Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)							
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>					<b>6.712.852.566</b>	<b>6.269.113.916</b>	<b>93.39</b>
1)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		35 Orang; 35 orang	35 Orang; 35 orang	100	1.891.592.653	1.779.099.724	94.05
2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		12 bulan	12 bulan	100	1.319.445.171	1.275.155.600	96.64
3)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		33 unit	33 unit	100	554.255.432	468.742.611	84.57
4)	Pengelolaan Risiko Bencana		20 Provinsi, kab/ kota; 1 kali; 1 kali; 19 kab/kota	20 Provinsi, kab/ kota; 1 kali; 1 kali; 19 kab/kota	100	319.073.956	299.140.002	93.75
5)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		30 kali; 35 nagari/de sa/kelura han	30 kali; 35 nagari/de sa/kelura han	100	1.708.459.316	1.590.763.138	93.11
6)	Penanganan Pascabencana Provinsi		25 orang; 28 orang; 1 laporan; 1 paket;	25 orang; 28 orang; 1 laporan; 1 paket;	100	296.434.271	284.869.573	96.10
7)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		35 orang	35 orang	100	121.811.378	115.276.611	94.64
8)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		1 kali	1 kali	100	177.690.778	165.750.840	93.28

9)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		1 Dokumen	1 Dokumen	100	324.089.611	290.315.817	89.58
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>					<b>825.200.472</b>	<b>808.203.827</b>	<b>97.94</b>
1)	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		1 Laporan	1 Laporan	100	307.650.516	3301.367.569	97.96
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		1 Laporan	1 Laporan	100	47.608.088	46.663.750	98.02
3)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2 paket	2 paket	100	420.978.544	411.415.995	97.73
4)	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		1 Laporan	1 Laporan	100	48.963.324	48.756.513	99.58
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Permendagri No 86 tahun 2017, Pergub No. 45 Tahun 2019</b>				<b>162.046.012</b>	<b>150.032.867</b>	<b>92.59</b>
1)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		2 laporan	2 laporan	100	28.973.328	24.610.198	84.94
2)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi		1 laporan	1 laporan	100	133.072.684	125.422.669	94.25

**Tabel 2.3**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dalam penerapan SPM ditemukan beberapa masalah diantaranya: Kurang sinkronnya data dari dinas terkait mengakibatkan sulitnya proses pengumpulan data dan informasi; kurangnya sarana dan prasarana; kurangnya anggaran untuk	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	

		operasional penanggulangan bencana; beberapa kabupaten/kota masih belum memiliki dokumen kajian risiko bencana, peta rawan bencana dan rencana kontijensi bencana		
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan dan ada honorarium yang tidak dapat dicairkan karena tidak sesuai aturan yang ada	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
4)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
6)	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis	



	Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
8)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
1)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
4)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
5)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
6)	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis	

	Kelengkapannya	karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
4)	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam hal pengiriman aparatur untuk mengikuti undangan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara selektif karena banyak lembaga yang mengundang tidak atau diragukan kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi	Perlu ditingkatkan kerjasama antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang resmi dan terakreditasi terutama untuk pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kebencanaan.	
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan	

			pekerjaan	
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>6</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>			
1)	Pengadaan Mebel	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>7</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	

3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>8</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
4)	Pemeliharaan Mebel	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
5)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
6)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
7)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
8)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan	Dukungan dan komitmen BPBD serta Tim Teknis sangat mempermudah Tim	

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sesuai kebutuhan	Penyusun dan Substansi dalam melaksanakan pekerjaan	
<b>II</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>			
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>			
1)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Pengiriman Peserta tidak sesuai dengan Target yang diharapkan.	Kedepannya untuk pelatihan teknis SPAB, penyebarluasan informasi dan permintaan peserta di upayakan untuk bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi sumatera barat melalui jaringan komunikasinya, Untuk permintaan peserta diserahkan kepada institusi terkait dengan menetapkan kriteria dan klasifikasi peserta.	
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>			
1)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BPBD kab/kota belum menginisiasi data relawan dilingkungan masing-masing sehingga ketika difasilitasi untuk pelatihan tidak jarang ditemukan relawan yang kurang serius selama kegiatan; Kurangnya koordinasi dan komunikasi serta komitmen antara masyarakat dan BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait PB; Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/ melaksanakan kegiatan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan hubungan antara BPBD Kabupaten/Kota dengan masyarakat agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal wajib yang dilakukan secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing; Serta membentuk wadah komunikasi bersama agar inspirasi dan kendala masyarakat dalam bidang kebencanaan dapat terakomodir secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing	

2)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum seluruh kabupaten/kota yang membentuk Pusdalops PB sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pendataan, Masih kurangnya Kapasitas personil Pusdalops PB sehingga perlunya pelatihan personil.	Perlunya melakukan pembinaan dan pelatihan personil Pusdalops PB provinsi dan kabupaten/kota serta menghimbau kabupten/kota untuk segera membentuk Pusdalops.	
3)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Hingga periode Laporan Akhir ini bisa dikatakan tidak ditemui kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, Kurangnya anggaran sehingga tidak semua EWS yang bi	Kedepannya diupayakan mencari vendor/ penyedia barang dan jasa yang lebih berpengalaman	
4)	Pengelolaan Risiko Bencana	Berdasarkan alasan risiko pandemi Covid-19 dan pemotongan anggaran, pelaksanaan Jambore PRB tingkat provinsi batal dilaksanakan dan ada potensi tidak terlaksana ditahun 2023 karena keterbatasan anggaran sedangkan Jambore PRB merupakan bagian dari indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan indikator kinerja kepala daerah; kurangnya Monitoring, evaluasi, pendekatan kelembagaan dan tingkat keaktifan forum PRB Provinsi; Kurangnya komitmen BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam hal membentuk Forum PRB selain itu masih tingginya nutasi pegawai BPBD di tingkat kab/kota sehingga sulit dalam komunikasi dan koordinasi serta tidak semua kab/kota dapat mengikuti kegiatan	Perlu adanya dukungan terkait penambahan penganggaran mengingat IKD harus dipenuhi; perlunya komitmen dalam membentuk dan F-PRB se-Sumatera Barat dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah serta provinsi maupun kabupaten/kota terkait pelaksanaan PRB untuk mendukung kebijakan dan penganggaran kegiatan BPBD Kabupaten/Kota, agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal wajib yang dilakukan secara langsung dan sesuai kewenangan daerah masing-masing.	

		dikarenakan birokrasi di daerah yang cukup rumit.		
5)	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peran serta BPBD Kabupaten/Kota di beberapa nagari penumbuhan DESTANA belum maksimal sehingga dikhawatirkan DESTANA tidak terbentuk dengan optimal; Kurangnya perhatian dan keseriusan beberapa BPBD Kabupaten/Kota terhadap pengembangan kapasitas kelompok di daerah yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan KSB di Kabupaten/Kota; Ada beberapa Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan pembinaan KSB tetapi tidak mendatangkan KSB nya bahkan ada yang belum terbentuk; Peraturan berkaitan dengan pemakaian Dana Desa terkait penanganan bencana masih belum jelas sehingga Nagari/Desa ragu untuk menganggarkannya; Keterbatasan armada transportasi dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan perencanaan, kebijakan, penganggaran dan pelaksanaan dalam meningkatkan hubungan antara kelembagaan kebencanaan daerah dan BPBD Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan sinergi yang baik. Perlu ada ruang komunikasi dan keseriusan OPD BPBD Kab/Kota untuk menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dengan menghasilkan <i>punishment and reward</i> sehingga masyarakat lebih terayomi dalam menghadapi bencana dibawah kewenangan daerah masing-masing; serta Perlu ditingkatkan Monitoring dan Evaluasi dalam memantau perkembangan DESTANA di kabupaten/kota	
6)	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan dengan maksimal terutama dalam monitoring kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasaca bencana dengan anggaran yang tersedia melalui skala prioritas kegiatan; Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	

		<p>dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P) sehingga usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi terlambat.</p>	<p>pasca bencana di kabupaten/kota dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia; Memberikan bimbingan kepada BPBD Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) kepada sumber daya manusia yang ada di daerah</p>	
7)	<p>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TpRC) Bencana</p>	<p>Kurangnya Dukungan terkait penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Terbatasnya SDM dalam mengelola/ melaksanakan Kegiatan, adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga tidak terlaksananya pelatihan TRC.</p>	<p>Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing</p>	





8)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<p>Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan masih kurang, sehingga gladi hanya dilaksanakan dengan keterlibatan 125 peserta dengan cakupan daerah terdampak jauh lebih luas; Dukungan dari BPBD Kabupaten Solok masih kurang dikarenakan undangan yang diharapkan untuk mengikuti kegiatan tidak hadir pada saat pelaksanaan dan peralatan yang diharapkan juga tidak tersedia; Perlengkapan kesiapsiagaan kebencanaan tidak dalam keadaan optimal sehingga fungsinya tidak dapat ditunjukkan secara langsung dan memerlukan perbaikan; Organisasi masyarakat masih belum bisa diikuti sertakan karena keterbatasan anggaran serta perlunya komitmen dari Forkopinda dalam pelaksanaan Gladi ini.</p>	<p>Perlu adanya rapat koordinasi BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Forkopinda di Sumatera Barat untuk meningkatkan komitmen baik dalam hal penganggaran, perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dalam menangani Bencana tipikal di daerah serta provinsi, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.</p>	
9)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			
1)	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	<p>Akurasi data sangat kurang di awal masa tanggap darurat. Hal ini disebabkan karena perubahan di lapangan yang sangat dinamis. Koordinasi dan integrasi data sangat sulit atau memerlukan waktu karena pelaku pendataan yang banyak sehingga data tidak</p>	<p>Perlu diperkuat sistem-sistem pada level masyarakat guna percepatan dalam melakukan penanganan darurat bencana antara lain untuk sinkronisasi tim yang akan membantu dalam tugas penanganan pada saat terjadinya bencana, pendistribusian logistik dan pengoperasian</p>	

		terstandar. Disisi lain ego serktoral membuat integrasi data semakin sulit dilaksanakan dan lemahnya koordinasi antar unit/ institusi Pemerintahan, dan juga koordinasi dengan/antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi Kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.	peralatan penanggulangan bencana yang bekerja sesuai dengan Prosedur Tetap	
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Masih perlu peningkatan dalam penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana dikarenakan tingginya potensi bencana di Sumatera Barat.	Perlunya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran dalam Peningkatkan Penangan Tanggap Darurat Bencana dalam menghadapi bencana sesuai kewenangan daerah masing-masing	
3)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masih terbatasnya peralatan kebencanaan yang dimiliki saat ini dan belum terpeliharanya peralatan kebencanaan yang ada karena keterbatasan alokasi anggaran terkait pemeliharaan dan penyediaan peralatan dan logistic kebencanaan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dan penganggaran terkait peningkatan tanggap darurat kebencanaan.	
4)	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/ Wabah Penyakit	Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola/melaksanakan kegiatan.	Perlu ditingkatkan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait dukungan kebijakan dalam penanggulangan respon cepat bencana non alam.	
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			
1)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Belum adanya system informasi yang terintegrasi untuk kabupaten/kota; Dan terlambatnya dukungan data dan informasi dari daerah	Kedepannya akan ditingkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan kabupaten/kota; Konsinyering penginputan data dan informasi bencana; serta permintaan data langsung ke kabupaten/kota	

2)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat; Penghimpunan data kebencanaan dari kabupaten/kota yang sering tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Hal tersebut dapat mengurangi keakuratan dan penyebaran data kebencanaan yang berfungsi sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.	Perlu ditingkatkan komitmen BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana, serta ketersediaan data kebencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai TUPOKSI dan kewenangan dinas/instansi dan daerah masing-masing	
----	--	--	--	--

### 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPBD 2 dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun 1 Dokumen sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah dokumen perubahan RKA



SKPD yang disusun 2 dokumen, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah dokumen DPA yang disusun 1 dokumen, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dengan output kegiatan ini Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun 2 Dokumen, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output kegiatan ini jumlah dokumen evaluasi yang disusun 4 dokumen, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun 13 dokumen, sehingga otomatis akan meningkatkan capaian program

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan ini adalah Gaji dan Tunjangan ASN BPBD untuk satu tahun yang dianggarkan 50 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan honor 18 orang sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 3) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan 100 Dokumen sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 4) Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun 36 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 5) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan
-

keuangan SKPD yang disusun 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- 6) Sub kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan 2 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 7) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan 13 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 8) Sub kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang di susun 1 dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 3) Sub kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang milik daerah SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 4) Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Dokumen barang milik daerah semesteran dan akhir tahun yang disusun 3 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
-

- 5) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 6) Sub kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen usulan pinjam pakai 1 Dokumen dan Jumlah dokumen usulan sewa 1 dokumen sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

#### 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya 90 stel, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 2) Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 45 dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan 12 kali, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 4) Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan output kegiatan ini adalah Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya 45 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

#### 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan 116 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 349 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
-

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan 1083 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 4) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 51479 lembar, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 5) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 7 set. sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Mebel 7 unit/set, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 2) Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru 3 unit/set jenis, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 3) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output kegiatan ini adalah Jumlah surat – surat masuk dan surat – surat keluar dalam 1 tahun 500 surat, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kapasitas tagihan
-

internet yang dibayarkan 100 mbps, Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan 2 rekening, Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan 12 bulan, Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 1375 KVA, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan ini adalah Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia 26 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

#### 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 1 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara 51 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan output kegiatan ini adalah Jumlah alat besar yang dipelihara 1 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 4) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Mebel yang dipelihara 1 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 5) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 99 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 6) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab 5 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
-



7) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab 2 unit, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 46 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

II. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 4 kegiatan dan 16 sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

1) Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) dengan output kegiatan ini adalah Kampanye/pbulikasi media/pameran/pembuatan baliho kebencanaan yang dilaksanakan 1 kali; Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilaksanakan 2 kali; Sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilaksanakan 58 kali, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1) Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan output kegiatan ini adalah Pelatihan kebencanaan bagi aparatur yang dilaksanakan 90 orang; Pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan 630 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

2) Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan output kegiatan ini adalah Petugas PUSDALOPS PB yang difasilitasi 12 bulan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan output kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana (peralatan perlindungan, EWS Tsunami/Letusan gunung api/banjir/longsor) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

---

- 4) Sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana dengan output kegiatan ini mengikuti jamboree PRB tingkat nasional 1 kali; Rapat koordinasi PRB tingkat provinsi yang dilaksanakan 1 kali, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program`
- 5) Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan output kegiatan ini Pembinaan kelompok siaga bencana (KSB) di kabupaten/kota yang dilaksanakan 35 kali; Sosialisasi/penumbuhan/pembinaan nagari tangguh bencana DESTANA yang dilaksanakan 10 nagari/desa/kelurahan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 6) Sub kegiatan Penanganan Pasca bencana Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Bimbingan teknis/workshop JITU PASNA yang dilaksanakan 25 orang; Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikoordinasikan 1 laporan; Rapat koordinasi/pertemuan teknis JITU PASNA yang dilaksanakan 28 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 7) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana dengan output kegiatan ini adalah Pembinaan/pelatihan TRC Provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan 35 orang, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 8) Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan output kegiatan ini adalah Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan 1 kali, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 9) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dengan output kegiatan ini adalah Dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RKPB) yang disusun 1 Dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

### 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana dengan output kegiatan ini adalah Penanganan darurat bencana secara teroadu yang dikoordinasikan 1 laporan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
-

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan output kegiatan ini adalah Logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 3) Sub kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit dengan output kegiatan ini adalah Penanganan epidemic/wabah penyakit secara terpadu yang dikoordinasikan 1 laporan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 2) Sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil pengukuran/penyebarluasan basis data kebencanaan yang dilaksanakan 2 laporan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
  - 3) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Laporan hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 4 kegiatan dan 16 sub kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penanggulangan Bencana

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.4**

### **Kebijakan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	2	3	4
1		<b>N I H I L</b>	
<b>CONTOH</b>			
2	Dst		

### 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel 2.5**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Memasyarakatkan kembali program mitigasi bencana kepada masyarakat dalam upaya menyiapkan masyarakat terhadap potensi bencana.	Sebagai mana kita ketahui Provinsi Sumatera Barat memiliki ancaman Bencana yang sangat komplek terutama Bencana Alam, hampir seluruh potensi bencana alam ada di Sumatera Barat, dan yang paling tinggi ancamannya adalah Gempa Bumi dan Tsunami. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2022.	
		Berkenaan dengan hal diatas Provinsi Sumatera Barat sudah membudayakan Mitigasi Bencana dalam sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi sudah berlakukan upaya Mitigasi tanpa henti melalui semua sektor pembangunan yang berorientasi Pengurangan Risiko Bencana diantaranya adalah menyusun rencana tataruang, penetapan standar konstruksi bangunan, meningkatkan dan pemeliharaan EWS (Sirine Tsunami)	
		Sedangkan Mitigasi Non Struktural yang terus menerus	

		<p>dilakukan adalah memberikan informasi, sosialisasi kebencanaan dengan berbagai program antara lain : 1. Sosialisasi, Komunikasi Informasi, Edukasi Rawan Bencana untuk tingkat Sekolah Satuan Aman Bencana 2. Mendorong Ketangguhan Nagari/Desa/Kelurahan dengan Program Desa Tangguh Bencana 3. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas Relawan, Kelompok Siaga Bencana (KSB), Forum- Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) melalui Pelatihan Mitigasi Bencana yang tetap kita laksanakan setiap tahun.</p>	
2.	Menyiapkan manajemen kenbencana daerah yang terpadu dan saling terintegrasi dengan semua stakeholder.	<p>Dalam upaya Penanggulangan Bencana Daerah yang terpadu dan saling terintegrasi dengan semua Stakeholder, Provinsi Sumatera Barat sudah membuat beberapa Dokumen Penanggulangan Bencana antara lain : 1. Dokumen Kajian Risiko Bencana 2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (merupakan salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang berorientasi Pengurangan Risiko Bencana) 3. Dokumen Rencana Kontigensi (dokumen ini kita ujikan dalam bentuk TTX, CPX dan Simulasi yang melibatkan semua pihak dalam Penanggulangan Bencana sesuai Tupoksi masing-masing.</p>	



## 2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

**Tabel 2.6**

### Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Fraksi PKS meminta agar kesiapsiagaan pemerintah daerah terhadap bencana betul – betul ditingkatkan karena kita menyadari bahwa sumatera barat adalah daerah yang potensi bencananya cukup besar salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan membentuk relawan siaga bencana atau menumbuhkan kelompok siaga bencana atau menumbuhkan kelompok siaga bencana (KSB) baik di nagari atau kelurahan sehingga relawan dan KSB inilah yang pertama kali melakukan tindakan darurat apabila terjadi bencana	Upaya kesiapsiagaan bencana merupakan program unggulan pembangunan provinsi sumatera barat hal ini tertuang dalam RPJM provinsi diantaranya adalah: Program Penumbuhan Desa Tangguh Bencana, Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat seperti KSB, Forum PRB baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	

## 3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

**Tabel 2.7**

### Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	FRAKSI PKS		
	Meminta agar kesiapsiagaan pemerintah daerah terhadap bencana betul – betul ditingkatkan karena kita	Upaya kesiapsiagaan bencana merupakan program unggulan pembangunan provinsi sumatera barat hal ini tertuang	

	menyadari bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang potensi bencananya cukup besar salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan membentuk relawan siaga bencana atau menumbuhkan kelompok siaga bencana atau menumbuhkan kelompok siaga bencana (KSB) baik di nagari atau kelurahan sehingga relawan dan KSB inilah yang pertama kali melakukan tindakan darurat apabila terjadi bencana	dalam RPJM provinsi diantaranya adalah: Program Penumbuhan Desa Tangguh Bencana, Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat seperti KSB, Forum PRB baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	
--	---	--	--

#### 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

**Tabel 2.8**  
**Penghargaan yang Diraih Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	<b>N I H I L</b>			<b>L</b>
2	<b>N I H I L</b>			<b>L</b>
3	<b>N I H I L</b>			<b>L</b>



**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN**

1. Pada Tahun Anggaran 2022, BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak menerima Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Pada Tahun Anggaran 2022, BPBD Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan Dana Tugas Pembantuan.





## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

---